

**PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA DALAM PELAYANAN
PUBLIK DI ERA DIGITAL DI DESA TEMON KECAMATAN SAWOO
KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2024**



Oleh :

Nama Mahasiswa : SUNARJI

NIM : 22222095

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
TAHUN 2024**

**PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA DALAM
PELAYANAN PUBLIK DI ERA DIGITAL DI DESA TEMON
KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2024**

HKI

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Dalam Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Di
Program Studi Ilmu Pemerintahan



Oleh :

Nama Mahasiswa : SUNARJI

NIM : 22222095

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
TAHUN 2024**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
Telp (0352) 481124, Fax. (0352) 461796, e-mail : akademik@umpo.ac.id Website : www.umpo.ac.id
Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT
(SK Nomor : 77/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

LEMBAR PERSETUJUAN
PENGGANTI TUGAS AKHIR MAHASISWA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Robby Darwis Nasution, S.IP., M.A**
NIK : 19860228 201509 12
Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Menyetujui bahwa publikasi ilmiah/kekayaan intelektual/PKM yang akan dilalukan dan/atau diajukan oleh nama mahasiswa di bawah ini adalah dijadikan sebagai pengganti tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan.

Nama : SUNARJI
NIM : 22222095
Prodi : Ilmu Pemerintahan
Judul : Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Dalam Pelayanan Publik di Era Digital di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo 2024

Demikian Surat persetujuan ini dibuat dengan sebenar benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Program Studi

Robby Darwis Nasution, S.IP.,M.A
NIK. 19860228 201509 12

Ponorogo, 12 Februari 2024

Dosen Pembimbing

Irvan Nur Ridho, SAP.,M.Si
NIDN. 0728048904

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir ini disusun oleh : Sunarji

NIM : 22222095

Judul : Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Dalam Pelayanan Publik Di Era Digital di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo Tahun 2024


Disahkan Pada : Februari 2024

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Pembimbing 1


Iryan Nur/Ridho, S.AP.,M.Si
NIDN. 0728048904

Pembimbing 2


Yusuf Adam Hilman, S.IP.,M.Si
NIDN. 0708118802

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Dalam Pelayanan Publik Di Era Digital di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo Tahun 2024

Disusun oleh : Sunarji

NIM : 22222095

Telah dipertahankan di depan penguji pada :

Hari : Senin, 05 Februari 2024

Ruang : B 103

PUKUL : 12.00 – 13.00 WIB

Dewan Penguji

Penguji I



Yusuf Adam Hilman, M.Si

NIDN. 0708118802

Penguji II



Drs. Bambang Triono, M.Si

NIDN. 0709066403

Penguji III



Irvan Nur Ridho, S.AP.,M.Si

NIDN. 0728048904

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Ayub Dwi Anggoro, Ph.D

NIK. 1986032520130912

LEMBAR PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini saya persembahkan kepada :

1. Untuk Ibu dan Bapak tercinta yang telah memberikan dukungan, penyemangat, dan cinta kasih yang tiada terhingga, karya kecil ini saya persembahkan untuk Ibu dan Bapak sebagai tanda bakti saya, hormat serta rasa terima kasih yang tiada terhingga. Terima kasih yang mendalam kepada Ibu dan Bapak yang telah mendoakan dan memotivasiku menjadilebih baik.
2. Orang istimewa, yang sebagai partner dalam segala hal, yang selalu memberiku suport agar aku selalu kuat dan tegar juga telah memberikan semangat kepada saya dalam menyusun tugas akhir ini.
3. Sahabat tersayang, yang selalu ada setiap saat memberikan suport yang luar biasa untuk saya dan membantu dalam proses penyusunan tugas akhir ini.
4. Dan juga semua orang-orang baik tanpa kecuali yang telah membantu seta mengarahkan saya untuk menyusun tugas akhir ini.

MOTTO

“ BELAJAR DARI KESALAHAN BERKEMBANG MENJADI LEBIH BAIK ”



ABSTRAK

Zaman semakin maju, tuntutan semakin banyak, perangkat Desa sebagai garda terdepan sebagai pelaksana Pembangunan paling bawah sangat perlu peningkatan SDM agar mampu beradaptasi dan mampu mengikuti perkembangan zaman sehingga pelayanan public ditingkat Desa di era digital lebih baik dan lebih meningkat. Dalam hal ini terdapat dua tantangan pelayanan publik di Desa Temon yaitu tantangan infrastruktur yaitu infrastruktur digital yang dapat mendukung pelayanan public, di antaranya ketersediaan jaringan internet yang cukup memadai, menu informasi Desa yang mudah di akses. Tantangan berikutnya adalah SDM, yaitu kemampuan literasi warga dalam memanfaatkan media sosial, media digital untuk mengakses berbagai informasi dan pelayanan publik. Dalam proses peningkatan kapasitas SDM yang dilakukan oleh pemerintah Desa Temon sudah baik walaupun banyak kendala, akan tetapi banyak usaha yang telah dilakukan untuk peningkatan kapasitas SDM Perangkat Desa Temon Sawoo Ponorogo. Langkah - langkah konkrit yang dilakukan pemerintah Desa Temon adalah mengikuti serta menyelenggarakan berbagai pelatihan dan bimbingan teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengikuti program Desa Digital (smart Village), melaksanakan publikasi kegiatan Desa, mengikuti kegiatan paralegal Desa di Kabupaten Malang Tahun 2023, menyelenggarakan peningkatan UMKM, membuat web Desa. Bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pelayanan publik perlu mendapatkan perhatian khusus, karena sudah menjadi sebuah tuntutan dengan perputaran perkembangan zaman yang semakin maju, Untuk bisa meningkatkan pelayanan publik di era digital sangat dibutuhkan peningkatan SDM dan Sumber Daya Dukung lainnya, seperti alat dan jaringan internet untuk mengakses semua informasi di media sosial.

Kata Kunci : Era Digital, Pelayanan Publik, Peningkatan

Kata Pengantar

Rasa syukur ke hadirat Allah SWT yang sangat mendalam atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan penelitian ini dengan lancar. Meski mendapatkan kendala, tapi saya bisa melaluinya sehingga laporan penelitian berjudul “ Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Dalam Pelayanan Publik di Era Digital Di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 ” ini dapat terselesaikan tepat waktu.

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Saya ucapkan terima kasih kepada Dosen pembimbing yang tidak lelah menerima ajakan diskusi. Kemudian kepada Perangkat Desa Temon Kecamatan Sawoo yang bersedia saya wawancarai, tanpa kesediaan mereka saya tidak akan mendapatkan data yang lengkap untuk menyusun penelitian ini.

Selain itu saya sangat berterima kasih kepada orang tua, sahabat dan teman-teman. Mereka telah memberikan dukungan serta do'a sehingga saya memiliki kekuatan lebih untuk mengumpulkan data dan melakukan analisis.

Saya menyadari bahwa penyusunan penelitian ini masih banyak kekurangan. Saya berharap pembaca bisa memberikan kritik agar tulisan selanjutnya jauh lebih baik. Disisi lain, saya berharap pembaca menemukan pengetahuan baru dari laporan penelitian ini. Walaupun tulisan ini tidak sepenuhnya bagus, saya berharap ada manfaat yang bisa diperoleh oleh pembaca.

Sawoo, 11 Pebruari 2024

Penulis

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sunarji
NIM : 22222095
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Tugas Akhir dengan judul “ Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Dalam Pelayanan Publik Di Era Digital di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 ” adalah hasil karya saya dan naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk mendapat memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan.
2. Apabila dalam tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur PLAGIASI, saya bersedia TUGAS AKHIR ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas Akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTI NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 05 Februari 2024

Yang menyatakan,



Sunarji
NIM. 22222095

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANGTAR	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Konsep	9
F. Kajian Teori	11
G. Metode Penelitian	12
BAB II	18
PEMBAHASAN	18
A. Diskripsi Umum	18
B. Pembahasan	21
1. Perlunya Peningkatan SDM	21
2. Tantangan Pelayanan Publik Di Era Digital	22
3. Proses Peningkatan Kapasitas SDM	25
4. Tindakan Kongkrit Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Desa Temon Dalam Peningkatan Kapasitas SDM	26

BAB III	28
A. KESIMPULAN	28
B. SARAN	29
DAFTAR PUSTAKA	30



PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA
DALAM PELAYANAN PUBLIK DI ERA DIGITAL DI DESA
TEMON KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2024

A. Latar Belakang

Di era digital saat ini hampir semua sektor dituntut untuk menerapkan sistem digitalisasi termasuk dalam sistem pemerintahan. Digitalisasi merupakan satu kata yang tidak bisa lepas dari pembahasan dunia industri. Berbagai bentuk digitalisasi sangat memudahkan setiap pekerjaan. (Araujo, Priadana, S., Paramarta, & Sunarsi, 2021) Sederhananya digitalisasi adalah proses perubahan yang terjadi pada teknologi bersifat analog ke teknologi bersifat digital. Tujuan digitalisasi tentu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja setiap bagian dari industri, sehingga waktu seluruh sumber daya yang dimiliki dapat diolah seoptimal mungkin. (Verihubs, 2022) Menurut Sukmana dalam Erwin, digitalisasi merupakan proses media dari bentuk tercetak, audio, atau video menjadi bentuk digital. Sedangkan teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu Technologia, suatu rancangan atau desain untuk alat bantu tindakan yang mengurangi ketidakpastian dengan hubungan sebab akibat dalam mencapai suatu hasil yang diinginkan. Perkembangan teknologi digital merupakan hasil rekayasa akal, pikiran, dan kecerdasan manusia yang tercermin dalam kemajuan ilmu pengetahuan yang memberikan manfaat dalam segala aspek kehidupan manusia. Manfaat

digitalisasi sendiri adalah untuk menyebarkan informasi, dengan begitu masyarakat semakin mudah dalam mendapatkan informasi yang diinginkan. (Wiranti & Frinaldi, 2023)

Perkembangan teknologi saat ini yang begitu pesat sehingga sangat dibutuhkannya penyesuaian terhadap teknologi demi menunjang kegiatan sehari-hari, pemerintah sebagai pemberi layanan dalam masyarakat juga harus mampu memanfaatkan teknologi demi menunjang kegiatan partisipasi. (Abd Aziz, Ab Rahman, & Alam, M. M., & Said, 2015) Digitalisasi yang telah masuk ke kehidupan sehari-hari juga banyak di manfaatkan oleh sektor swasta untuk mendapatkan keuntungan saat ini dengan mempermudah memberikan partisipasi yang bisa kita lihat di berbagai aplikasi mulai dari pengantar makanan, ojek, pesan antar barang dan jasa juga telah banyak memanfaatkan kemajuan (Aliamsyah, 2009) Manusia sebagai pengguna pasti ingin sesuatu yang mempermudah segala kegiatan, semua hal di coba untuk mengefisienkan waktu dan tenaga. Head of Strategy and Planning PHD Asia Pacific, menjelaskan lima tahap evolusi teknologi masa depan yang tumpang tindih. Tahapan perubahan muncul, mengorganisir, mengekstraksi, mengantisipasi dan mengangkat. Selama era pengembangan, yang berlangsung dari tahun 1950 hingga 1995, informasi diperoleh melalui komputer yang terhubung ke internet (Littlejohn, 2014) Pada tahap kedua, yang dikenal sebagai Organize (1990-2015), pengguna teknologi mengorganisir materi dari Internet yang dapat diakses di seluruh dunia dan

memiliki nilai tambah yang luas. Fase Unbundling, yang berlangsung dari tahun 2010-2025, ditandai dengan penggunaan gadget pintar, Internet of Things, kecerdasan buatan, dan asisten virtual untuk mempercepat komunikasi global. Pada tahap keempat, yang dijuluki Foresight (2020-2035), sistem kecerdasan buatan dapat belajar lebih dalam dan memahami keinginan masyarakat. Pengenalan teknologi yang mendukung kecerdasan buatan yang dapat mengubah cara orang berinteraksi akan menentukan fase kelima, yang dijuluki Lifting 2030-2050 (Reza, 2017)

Banyak profesi yang berbeda dipengaruhi oleh teknologi, dan beberapa pekerjaan akan tergantikan. Sembilan pekerjaan, termasuk pengemudi, petani, penerbit/cetak, agen perjalanan, kasir, pegawai bank, telemarketer, akuntan, dan pialang saham, diprediksi akan gulung tikar di masa (Astomo, 2014) Perkembangan teknologi juga berdampak langsung kepada kegiatan administrasi kantor di lembaga pemerintahan, Karena teknologi selalu berubah dan bahkan revolusioner, kantor harus terus beradaptasi dan menggunakannya. Paradigma partisipasi publik sedang berubah, dengan menempatkan lebih banyak fokus pada manajemen yang berfokus pada pelanggan (pemerintah yang digerakkan oleh kebutuhan warganya), yang sejalan dengan evolusi administrasi negara untuk mencapai partisipasi yang baik dan berkualitas tinggi. Tindakan memberikan kenyamanan dan layanan kepada masyarakat dalam rangka membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya demi efektivitas, efisiensi, dan

pemangkasan biaya (Suwondo, 2011)

Partisipasi publik harus mampu memberikan pelayanan yang prima karena tuntutan dari masyarakat yang menginginkan pelayanan harus bisa secara cepat, efektif dan efisien. Seorang birokrasi harus memiliki jiwa melayani dengan cara kerja yang lebih fleksibel dan berorientasi dialogis serta cara kerja yang lebih pragmatis dan realistis, yang Merujuk pada Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan bahwa "Dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan Sistem Informasi yang bersifat nasional" (RI, 2009) Sementara di Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Penyelenggara berkewajiban mengelola Sistem Informasi yang terdiri atas Sistem Informasi Elektronik atau Non elektronik yang sekurang kurangnya meliputi; profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelola pengaduan dan penilaian kinerja. Secara eksplisit terhadap topik partisipasi publik di dalam kebijakan, khususnya pada diskusi tentang elemen pendorong partisipasi tersebut. (Damanik, 2016) Selain karena pembahasan partisipasi masyarakat yang masih terfragmentasi, sebagian besar studi menempatkan partisipasi pada konteks peran warga sebagai salah satu pihak yang mampu mengimplementasikan kebijakan. Keadaan ini mengasumsikan bahwa partisipasi telah terbentuk secara final dan belum mengeksplorasi lebih jauh adanya ragam permasalahan pada tataran hulu seperti aksesibilitas

ataupun aspek sumber daya pendukung partisipasi. Padahal pemahaman mengenai partisipasi sendiri berkaitan erat dengan isu redistribusi kuasa kepada warga agar mampu secara aktif terlibat dalam setiap proses kebijakan sesuai dengan basis kebutuhan mereka. (Lim, Edelenbos, & Gianoli, 2019).

Kebutuhan untuk terus mengangkat isu partisipasi publik dalam kebijakan pembangunan perkotaan sangat diperlukan karena kota bukanlah ruang mati yang hanya disusun oleh infrastruktur fisik saja. Keberadaan kota sangat terikat oleh sekelompok individu yang bermukim, mendiami, serta beraktivitas di dalamnya yang menciptakan nilai-nilai serta interaksi antarmanusia (Suntoro & Hariri, 2015). Mengarusutamakan diskursus partisipasi publik artinya memberikan upaya pada terbentuknya ruang kota yang lebih inklusif serta menghindari tercerabutnya kepentingan organik masing-masing penduduknya. Partisipasi membuka kemungkinan bagi warga untuk mendobrak dominasi kapital dari proses industrialisasi yang bergeliat di kota (Haliim, 2016) Setiap penghuni kota mulai dari lingkup individu berkesempatan untuk mendefinisikan ulang bentuk perjuangan atas produksi ruang kota berdasarkan kebutuhan bersama. Pengamatan dinamika partisipasi publik dapat dijadikan pintu masuk untuk menelisik persoalan sistematis yang menjangkiti upaya partisipasi itu sendiri, baik dari aspek ketimpangan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat maupun kapasitas politik pemerintah dalam mengimplementasikan gagasan-gagasan yang bersifat kolaboratif (Butler, 2012)

Teknologi yang mempunyai peran penting untuk meningkatkan standar layanan, partisipasi publik secara digital bisa sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi maupun layanan secara cepat sehingga mampu untuk menciptakan kualitas layanan yang unggul. (Nurhakim, 2014) Pemerintah dapat menggunakan kemampuan digital untuk meningkatkan efisiensi partisipasi publik, memperluas keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan, dan meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas. Dengan menerapkan e-government, mempromosikan keterampilan digital karyawan, dan menggabungkan teknologi ke dalam prosedur pengambilan keputusan, pemerintah dapat meningkatkan kemampuan digital mereka (Sawitri, 2017). Bentuk partisipasi yang telah disinggung sebelumnya dapat diklasifikasikan ke dalam partisipasi pasif yang seolah-olah melibatkan peran masyarakat dalam tata kelola kota, namun ternyata tidak memberikan dampak apapun pada perubahan strategis kebijakan (Gao, Z., Wang, S., & Gu, 2020). Khususnya untuk permasalahan fundamental tata kelola, seperti kemacetan, tingkat polusi udara, bencana banjir, ataupun aksesibilitas hunian (Li, Wang, Luo, & Li, 2018). Pada dasarnya, memberi kemungkinan bagi warga untuk dapat mengumpulkan data publik melalui bantuan teknologi tidak serta merta membuat mereka dapat bertindak secara bermakna atas data tersebut (Lim et al., 2019)

Teknologi yang mempunyai peran penting untuk meningkatkan

standar layanan, dengan adanya digitalisasi bisa sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi ataupun layanan secara cepat sehingga mampu menciptakan kualitas layanan yang lebih unggul. Dengan pengaruh digitalisasi pemerintah dapat menggunakan kemampuan digital untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, serta memperluas keterlibatan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan tata negara.

Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui efektivitas partisipasi publik dalam pengambilan keputusan tata negara melalui digitalisasi. Serta mengetahui hambatan yang dihadapi dalam mengintegrasikan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan tata negara di era digital.

Perangkat Desa berfungsi memberikan pelayanan masyarakat antara lain ialah menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik, meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat, dan memelihara ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.

Di dalam memberikan pelayanan, Perangkat Desa kepada masyarakat masih terlihat banyak keluhan dari masyarakat. kecakapan dalam memberikan pelayanan adalah bagian dari masalah yang ditunjukkan di lapangan di antaranya tidak maksimal dan optimalnya pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Desa.

Kapasitas Perangkat Desa Temon dalam pelayanan publik dapat ditinjau dari tingkat pendidikan, peningkatan SDM melalui pelatihan-pelatihan kapasitas perangkat, kemampuan dalam mengikuti regulasi Desa, kemampuan

dasar dalam memahami tugas pokok dan fungsi.

Berdasarkan tinjauan itu dapat di sampaikan bahwa dari 15 perangkat Desa terdapat 3 yang kualifikasi pendidikanya S1, sedangkan yang lain Tingkat SLTA. Dari sini dapat dipahami bahwa secara Pendidikan masih sangat terbatas. Dilihat dari sisi pelatihan, di Desa juga sangat minim adanya pelatihan-pelatihan sebagai upaya peningkatan kapasitas perangkat Desa, dalam hal pemahaman regulasi Desa juga tidak semuanya mampu mengikuti perkembangan dan tuntutan, sehingga dalam berbagai hal hanya di handle oleh beberapa perangkat saja, apalagi yang terkait dengan digitalisasi (Triyono, sekdes Desa temon, 2024)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja upaya yang dilakukan untuk peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dalam pelayanan publik di era digital ?
2. Bagaimana Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dalam pelayanan publik di era digital ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk peningkatan Kapasitas perangkat Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten

Ponorogo dalam pelayanan publik di era digital.

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peningkatan kapasitas perangkat Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dalam pelayanan publik di era digital

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis yaitu dengan kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada pengembangan keilmuan terutama dalam dunia pemerintahan tingkat Desa.
2. Manfaat praktis adalah dengan kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada kegiatan penelitian berikutnya atau kepada pembuat kebijakan yang terkait dengan masalah peningkatan kapasitas Perangkat Desa.

E. Definisi Konsep

1. Pengertian Pelayanan Publik

Menurut KBBI, pelayanan publik adalah sebuah proses atau cara yang dilakukan untuk melayani masyarakat secara umum. Pelayanan publik merujuk pada segala layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah maupun sektor publik kepada masyarakat.

Pelayanan publik tidak hanya sebatas proses administratif, namun juga mencakup interaksi dan kualitas hubungan antara penyedia layanan dengan masyarakat. Ini melibatkan responsif, transparan, serta kesediaan untuk memberikan solusi yang efektif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Kapasitas Perangkat Desa

Pengembangan sumber daya aparatur dapat diartikan sebagai suatu usaha pengembangan yang memosisikan aparatur sebagai objek utama melalui usaha yang bersifat teknis, teoretis, konseptual, dan moral agar dapat meningkatkan kemampuan aparatur dan dijalankan sesuai prosedur yang sistematis (Mongilong, Singkoh, & Kairupan, 2018).

Aparatur Desa saat ini memerlukan pengembangan sumber daya untuk memperkaya kompetensi diri yang tentunya ditujukan untuk peningkatan kinerja dan hasil kinerja aparatur (Darmawan, 2013).

3. Pengertian Era Digital

Era digital adalah suatu zaman di mana teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Menurut para ahli, era digital diawali dengan adanya kemajuan teknologi komputer dan internet pada tahun 1990-an. Sejak saat itu, teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang dan semakin merambah ke berbagai aspek kehidupan manusia.

David Crystal, seorang ahli bahasa Inggris, mengatakan bahwa era digital adalah suatu zaman di mana informasi dan komunikasi diungkapkan dengan menggunakan teknologi elektronik. Selain itu, era digital juga ditandai dengan kecepatan dan kemudahan akses informasi serta kemampuan untuk berkomunikasi secara global.

F. Kajian Teori

1. Peningkatan kapasitas (managemen sumber daya manusia)

Di Dalam kamus hukum dan kamus otonomi daerah, kapasitas diartikan sebagai: “kemampuan seseorang atau perseorangan, organisasi atau sistem untuk melaksanakan tugas dan tugas serta wewenangnya untuk mencapai tujuannya secara efisien dan efektif. pembangunan negara dan penguatan kapasitas pemerintah dalam rangka mendukung desentralisasi, tertulis dalam kebijakan Menteri Dalam Negeri dan direktur bappenas tahun 2002, bahwa pembangunan dan peningkatan kapasitas melibatkan tiga tingkatan, yaitu: 1) Tingkat sistem , yaitu kerangka peraturan dan kebijakan yang mendukung atau membatasi pencapaian tujuan politik tertentu. 2) Tingkat kelembagaan atau unit, yaitu struktur organisasi, proses pengambilan keputusan internal, prosedur dan mekanisme operasional, alat manajemen, hubungan dan jaringan antar organisasi) Tingkat individu, yaitu tingkat keterampilan, kompetensi, pengetahuan/pemahaman, sikap, etika dan motivasi orang-orang yang bekerja dalam organisasi.

Pada tahun 2008, Pusat Pemerintahan Daerah Sendiri melakukan kajian peningkatan kapasitas pemerintahan Desa, dengan hasil: tidak semua Desa menyiapkan dokumen zonasi; Pendapatan keuangan Desa masih sangat bergantung pada kontribusi negara; kapasitas aparat Desa dalam membentuk politik Desa masih sangat rendah; Pengambilan keputusan kepala Desa belum berdasarkan prinsip pengelolaan modern; dan dalam

pemberian pelayanan publik, kapasitas administrasi Desa terbatas (kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perangkat Desa, sehingga mempengaruhi produktivitas dan kreativitas perangkat Desa.

Hasil survei pendahuluan yang dilakukan di Kabupaten Kudus menunjukkan bahwa keberadaan pemerintahan Desa belum dapat berfungsi secara maksimal dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Salah satu faktor yang menyebabkan belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan Desa adalah rendahnya kapasitas perangkat Desa dibandingkan beban kerja, wilayah, dan keterampilannya yang masih sangat terbatas akibat kurangnya kepemimpinan, pelatihan, dan pendidikan. pelatihan teknis untuk meningkatkan kapasitas perangkat Desa. Potret aparat Desa sedikit menunjukkan ketidakprofesionalan, kurangnya kreativitas dan inovasi, serta masih banyak potret negatif lainnya yang pada dasarnya menunjukkan bahwa aparatur Desa masih lemah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moeleong (2017) adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan dan lain-lain secara holistic dan

dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

3. Teknik Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini merujuk pada kelompok orang yang terdapat pada suatu instansi atau lembaga, dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik Purposive sampling yaitu cara penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu. Teknik pengambilan informan adalah merupakan cara yang digunakan dalam hal memperoleh data primer untuk bahan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan untuk penggalian informasi meliputi :

1. Kepala Desa Temon
2. Sekertaris Desa Temon
3. Kasi Pelayanan Desa Temon
4. Operator Desa Temon
5. Masyarakat Desa Temon

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer adalah pengumpulan data yang

dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian. Data kualitatif berbentuk deskriptif. Berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Pengumpulan data primer dapat dilakukan melalui :

- a. Teknik observasi yaitu pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung obyek penelitian dengan cara mencatat segala gejala yang di temukan dilapangan untuk mempelajari data-data yang diperlukan sebagai acuan yang berkenaan dengan topik penelitian. sebelum turun kelapangan peneliti menyusun pedoman obsevasi.
- b. Teknik wawancara, yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dengan pihak terkait untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan cara melakukan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan. Metode ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dan terbuka kepada informan atau pihak yang berhubungan dengan penelitian. Sebelum turun ke lapangan peneliti terlebih dahulu menyusun pedoman wawancara.
- c. Teknik dokumentasi, yaitu Teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumtasi-dokumentasi yang ada dilokasi penelitian atau sumber lain yang terkait dengan obyek penelitian.sebelum turun ke lapangan terlebih dahulu Menyusun pedoman dokumentasi.

5. Teknik Analisa Data

Sesuai dengan metode penelitian, teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis kualitatif. Teknik analisis dan penafsiran data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah yang direkomendasikan Miles dan Huberman (2014), yang lazim disebut dengan interactive model. Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan serta pengujian kesimpulan dengan melakukan analisis terhadap masalah yang ditemukan dilapangan sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang obyek yang diteliti dan menarik kesimpulan.

Dalam melakukan analisis data, terdapat beberapa tahapan antara lain :

a. Pengumpulan Data

Bagian pertama dari analisis data yaitu pengumpulan data, Dimana dalam tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Data yang diperoleh kemudian dijadikan satu untuk diolah dengan sistematis.

b. Reduksi Data.

Proses pemilihan, pemusatan pada penyerderhanaan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan dilapangan, melakukan transkrip data untuk memilih informasi mana yang

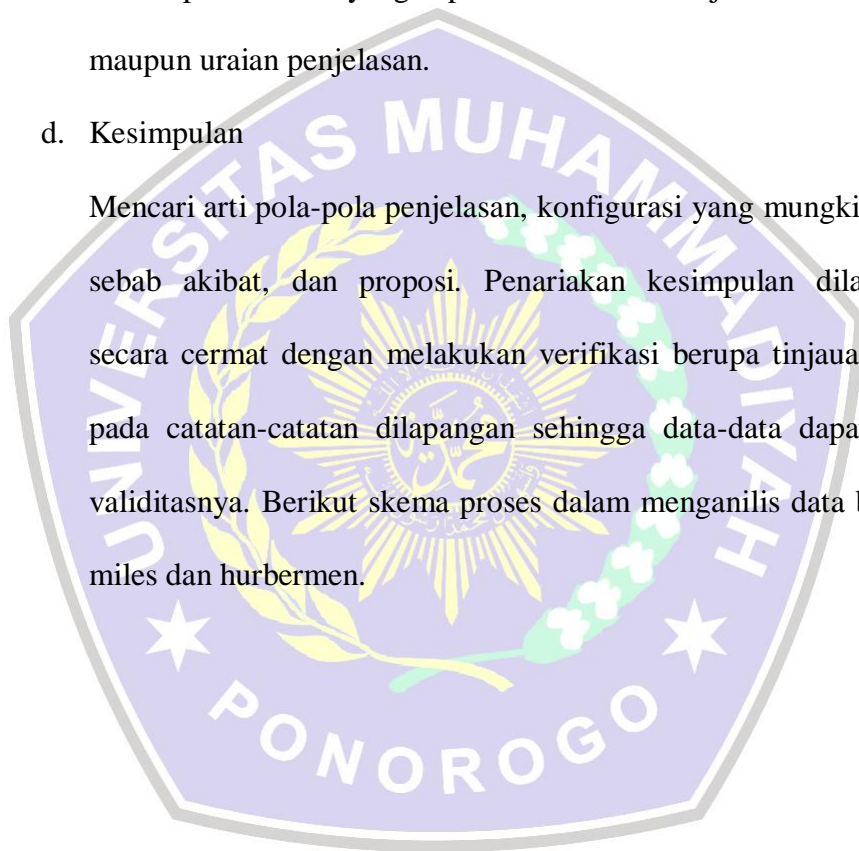
dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah yang menjadi pusat penelitian di lapangan.

c. Penyajian data

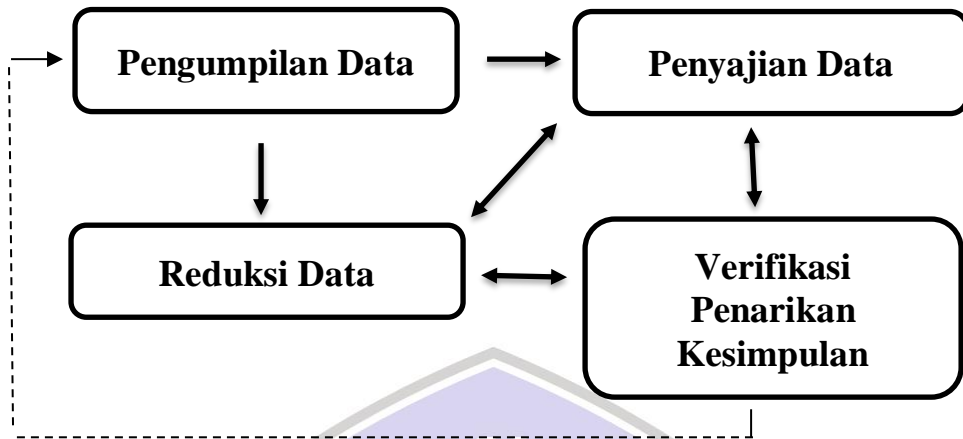
Informasi berbentuk naratif atau uraian teks grafik, jaringan, table, dan bagan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam table maupun uraian penjelasan.

d. Kesimpulan

Mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulan pada catatan-catatan dilapangan sehingga data-data dapat diuji validitasnya. Berikut skema proses dalam menganalisis data bentuk miles dan hurbermen.



Skema Analisis Data



BAB II

PEMBAHASAN

A. Diskripsi Umum

Desa Temon merupakan salah satu Desa yang berada di sebelah tenggara wilayah kabupaten Ponorogo, yang terletak di $-7^{\circ}56'41''$ LS, $111^{\circ}36'2''$ BT dengan ketinggian 724,0 Mdpl.

Batas-batas Desa Temon

Desa Temon Kec. Sawoo Kab. Ponorogo berbatasan dengan :

Sebelah Utara	:	Desa Ngadirojo
Sebelah Selatan	:	Desa Tumpak Pelem
Sebelah Timur	:	Desa Sriti
Sebelah Barat	:	Desa Sawoo

Jumlah Penduduk Desa Temon Kec. Sawoo Kab. Ponorogo berdasarkan Jenis

Kelamin :

Jumlah Laki-Laki (Orang)	:	3853
--------------------------	---	------

Jumlah Perempuan (Orang)	:	3770
--------------------------	---	------

Jumlah Kepala Keluarga (KK)	:	2156
-----------------------------	---	------

Jumlah Keseluruhan Penduduk (Orang)	:	7623
-------------------------------------	---	------

Visi misi Desa Temon adalah Agar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Temon terselenggara dengan baik dan terarah perlu dicapai dengan rencana Strategis Desa, yaitu telah ditempuh dengan penyusunan Dokumen dalam bentuk tentang Rencana Kerja (RKP Desa)

tahunan yang merupakan kegiatan tahunan pembangunan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Visi dan Misi Desa merupakan implementasi dari Visi dan Misi Kepala Desa terpilih dengan beberapa penambahan kegiatan yang disusun/digali berdasarkan musyawarah Desa secara partisipatif.

Visi Desa Temon Adalah “ Mewujudkan masyarakat Desa Temon yang aman, sejahtera dan bermartabat berazaskan gotong royong untuk mewujudkan Ponorogo lebih maju, berbudaya dan religius.”

Misi Desa Temon adalah :

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengenali, menganalisis sekaligus mencari pemecahan terhadap masalah-masalah prioritas pembangunan Desa, terutama dibidang fisik prasarana, sosial budaya, ekonomi, Pemerintahan, dan lingkungan hidup.
2. Melaksanakan pembangunan infrastruktur disemua bidang dengan adil dan merata.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan pelayanan kebutuhan dasar bagi warga Desa terutama di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar serta di bidang kesehatan.
5. Menumbuh kembangkan jiwa social yang tinggi, musyawarah mufakat dan gotong royong.

Data Perangkat Desa Temon Sawoo Ponorogo

Kepala Desa : Suwoto
Sekertaris Desa : Triyono
Kamituwo Brenggolo : Kadir

Kamituwo Temon	: Ranti
Kamituwo Senarang	: Hanif Sujarwanto
Kamituwo Mloko Legi	: Sujiantoro
Kasi Pemerintahan	: Turut Darsono
Kasi Kesejahteraan	: Sipur
Kasi pelayanan	: Boyono
Kaur Keuangan	: Katiran
Kaur Perencanaan	: Mulyanto
Kaur Tata Usaha	: Sri Utami

Dari segi pendidikan perangkat Desa temon yang berjumlah 16 orang dapat di ketahui , yaitu perangkat Desa yang berpendidikan S1 sebanyak 3 orang, dan yang 13 orang berpendidikan SLTA. Dalam usaha meningkatkan kapasitas perangkat Desa sudah banyak hal yang ditempuh, terutama selalu aktif dalam mengikuti program-program yang dilakukan oleh kecamatan, yang kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan dalam pelayanan publik. Termasuk didalamnya adalah penyesuaian adanya digitalisasi dalam pelayanan publik. Walaupun pada kenyataannya tidak semua perangkat Desa menguasai IT akan tetapi paling tidak dari sebagian besar dari para pelaksana Desa tersebut sudah mampu mengikuti perkembangan , terbukti sampai saat ini Desa Temon masih Exsis dalam memberikan pelayanan publik.

Secara teori sesuai perkembangan zaman, perangkat Desa dituntut mampu

memberikan pelayanan publik yang maksimal di era digital ini. Kemampuan tersebut tentunya tidak mungkin untuk dicapai dengan serta merta, akan tetapi membutuhkan waktu, proses untuk beradaptasi dengan media sosial ataupun hal-hal yang terkait dengan digital.

Jika dipandang dari sisi pendidikan tentunya kapasitas perangkat Desa temon sudah cukup mampu beradaptasi dengan perkembangan di era digitalisasi.

Dengan demikian pemanfaatan media digital dalam pelayanan public di Desa temon sudah dapat di lakukan sesuai kebutuhan yang ada.

B. Pembahasan

1. Perlunya Peningkatan SDM

Secara teori dengan begitu pesatnya perkembangan zaman ini aparatur pemerintah Desa dipandang sangat penting untuk meningkatkan SDM bahkan menjadi sebuah keharusan, agar aparatur pemerintah Desa dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Persoalan yang terjadi dapat diidentifikasi, lemahnya dan terbatasnya kapasitas sumber daya aparat yang mampu mengelola manajemen pemerintahan Desa dalam mendukung peningkatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Semestinya penggunaan dana Desa untuk peningkatan SDM aparatur Desa dapat menjadi wacana dan pemikiran Desa agar lebih maju.

Banyak sekali bentuk kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat), workshop serta bimbingan teknis (bimtek) yang bertujuan meningkatkan dan mengembangkan SDM aparatur pemerintah Desa. Hasilnya, kegiatan

ini sangat memberikan dampak positif yang signifikan serta dapat meningkatkan dan mengembangkan SDM aparatur pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat Desa Temon di dapat informasi bahwa sudah ada progres kegiatan yang fokus pada aspek peningkatan kapasitas dalam pelayanan publik, beberapa hal yang telah dilaksanakan diantaranya adalah :

- a. Mengikuti dan menyelenggarakan pelatihan dan bimtek sesuai dengan tupoksi perangkat desa yang telah ditentukan berdasarkan peraturan per undang-undangan.
- b. Mengikuti program Desa Digital (Smart Village)
- c. Mengikuti kegiatan Paralegal se kecamatan Sawoo
- d. Melaksanakan publikasi kegiatan Desa

2. Tantangan Pelayanan Publik di Era Digital

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Anas menargetkan pembukaan 120 mal pelayanan publik digital sepanjang 2023 di seluruh Indonesia. Jumlahnya diharapkan mencapai 411 mal pada 2024. Hingga Januari 2023, pemerintah telah membuka 103 mal yang tersebar di berbagai wilayah.

Ide ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mereformasi birokrasi untuk mempercepat pemberian layanan publik kepada masyarakat. Mal pelayanan digital ini memberikan segala layanan administrasi kependudukan, mulai dari pembuatan Kartu Tanda

Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, Akta Kelahiran, hingga Akta Kematian. Dengan layanan digital ini, pemerintah dapat menghemat 50% waktu pelayanan dan 50% anggaran layanan publik.

Berdasarkan hasil observasi di Desa Temon Kecamatan Sawoo Ponorogo, pelayanan publik yang berbasis digital masih sangat minim, ini terbukti dengan adanya pelayanan Masyarakat dalam urusan surat menyurat maupun urusan lain masih berbasis kertas, Masyarakat masih harus datang ke balai desa untuk mengurus segala administrasi, karena belum adanya pemanfaatan digitalisasi. Begitu juga dengan pelayanan yang lain seperti bentuk undangan juga masih berbasis kertas. Walaupun demikian untuk urusan pemerintahan dengan atasan (Kecamatan, kabupaten) sudah mulai menggunakan media digital sesuai arahan dari pemerintah tersebut.

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan kasi pelayanan diperoleh informasi bahwa memang pelayanan public secara menyeluruh belum maksimal, hal tersebut dikarenakan banyaknya tantangan yang ada di Desa ini.

Beberapa tantangan yang terdapat di Tesa Temon antara lain :

- a. Tantangan infrastruktur yaitu tantangan dimana pemerintah dalam membangun pelayanan publik berbasis digital adalah infrastruktur digital yang bisa mendukung pelayanan public, diantaranya adalah Ketersediaan internet cepat merupakan aspek krusial untuk

memastikan layanan digital Literasi warga

- b. Tantangan kedua adalah bahwa pemerintah Desa Temon masih memiliki pekerjaan rumah terkait dengan literasi digital masyarakat.

Literasi digital merupakan kemampuan untuk memahami dan memanfaatkan informasi dari berbagai sumber, yang bisa diakses melalui komputer atau media digital lainnya. Sementara itu Masyarakat belum mampu mengakses berbagai informasi di Desa melalui media sosial, segala sesuatu yang terkait dengan desa biasanya masih berdasarkan informasi saat ada rapat atau sosialisasi di balai desa.

Dengan demikian jelaslah tantangan pelayanan publik dengan digitalisasi membutuhkan seperangkat peralatan digital dengan berbagai komponennya, termasuk SDM dan alat seperti jaringan internet dan lain-lain.

- c. Kemampuan SDM masih kurang mumpuni
- d. Daya dukung pelaksanaan Desa digital masih kurang mencukupi
- e. Pelaksanaan pelayanan digital masih belum bisa optimal.

3. Proses Peningkatan Kapasitas SDM

SDM merupakan faktor penting dalam pembangunan nasional. Tanpa adanya SDM berkualitas, banyak aspek pembangunan akan terhambat. Misalnya, tidak ada SDM yang bagus untuk mengembangkan teknologi dalam negeri, padahal itu sangat penting di era teknologi Industri 4.0.

Dalam rangka meningkatkan SDM yang unggul di Indonesia, terdapat

beberapa hal yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM tersebut, antara lain yaitu : Melakukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh terutama kualitas pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa (character building) melalui penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai diklat, kompetensi, serta pembinaan sehingga tercipta tenaga kerja yang profesional dan terampil sesuai dengan kebutuhan pasar. Hal ini merupakan salah satu faktor keunggulan dari suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global. Pembinaan dan pengembangan generasi muda sebagai penopang utama dalam roda pembangunan. Dari pemberdayaan generasi muda ini diharapkan dapat menciptakan generasi yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing tinggi sehingga mampu berkontribusi dan memenangkan persaingan global.

Terkait dengan proses peningkatan kapasitas SDM perangkat Desa, pemerintah Desa telah melakukan dan mengikuti berbagai kegiatan pelatihan-pelatihan. Walaupun banyak kendala di berbagai bidang akan tetapi tetap melaksanakan sebuah terobosan-terobosan agar proses peningkatan kapasitas perangkat desa temon dapat berjalan terus, berkesinambungan dan berkelanjutan.

4. Tindakan Konkrit yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Temon dalam

peningkatan kapasitas SDM.

Beberapa langkah konkrit yang telah dilakukan Pemerintahan Desa Temon dalam rangka meningkatkan kapasitas perangkat Desa adalah :

- a. Memasukan program peningkatan kapasitas Perangkat Desa didalam program kerja pemerintahan Desa
- b. Selalu mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis sesuai tupoksi sebagai Perangkat Desa berdasarkan peraturan yang ada
- c. Mengikuti program Desa digital
- d. Membuat Web Desa Temon
- e. Melaksanakan pelatihan pemanfaatan teknologi digital
- f. Menyelenggarakan pelatihan peninkatan UMKM
- g. Mengikuti kegiatan Paralegal Desa
- h. Melakukan publikasi seluruh kegiatan Desa melalui media sosial.
- i. Secara berelanjutan menekankan kepada Perangkat Desa untuk belajar tentang pemanfaan IT untuk peningkatan pelayanan publik di Desa Temon.

PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI ERA DIGITAL DI DESA TEMON KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO



Perlunya Peningkatan SDM

Zaman semakin maju, tuntutan semakin banyak, perangkat Desa sebagai garda terdepan sebagai pelaksana Pembangunan paling bawah sangat perlu peningkatan SDM agar mampu beradaptasi dan mampu mengikuti perkembangan zaman sehingga pelayanan public ditingkat Desa di era digital lebih baik dan lebih meningkat.



Tantangan Pelayanan Publik di era digital

Terdapat dua tantangan pelayanan publik di Desa Temon yaitu tantangan infrastruktur yaitu infrastruktur digital yang dapat mendukung pelayanan public, di antaranya ketersediaan jaringan internet yang cukup memadai, menu informasi Desa yang mudah di akses. Tantangan berikutnya adalah SDM, yaitu kemampuan literasi warga dalam memanfaatkan media sosial, media digital untuk mengakses berbagai informasi dan pelayanan publik.



Proses Peningkatan Kapasitas SDM

Proses peningkatan kapasitas SDM yang dilakukan oleh pemerintah Desa Temon sudah baik walaupun banyak kendala, akan tetapi banyak usaha yang telah dilakukan untuk peningkatan kapasitas SDM Perangkat Desa Temon Sawoo Ponorogo.



Langkah Konkrit

Langkah konkrit yang dilakukan pemerintah Desa Temon adalah mengikuti serta menyelenggarakan berbagai pelatihan dan bimbingan teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengikuti program Desa Digital (smart Village), melaksanakan publikasi kegiatan Desa, mengikuti kegiatan paralegal Desa di Kabupaten Malang Tahun 2023, menyelenggarakan peningkatan UMKM, membuat web Desa.

Bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pelayanan publik perlu mendapatkan perhatian khusus, karena sudah menjadi sebuah tuntutan dengan perputaran perkembangan zaman yang semakin maju. Untuk bisa meningkatkan pelayanan publik di era digital sangat dibutuhkan peningkatan SDM dan Sumber Daya Dukung lainnya, seperti alat dan jaringan internet untuk mengakses semua informasi di media sosial.

**PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA
DALAM PELAYANAN PUBLIK DI ERA DIGITAL DI
DESA TEMON KEC SAWOO PONOROGO**

**PERLUNYA PENINGKATAN
SDM**

Zaman semakin maju, tuntutan semakin banyak perangkat desa sebagai garda terdepan sebagai pelaksana pembangunan paling bawah sangat perlu peningkatan sdm agar mampu beradaptasi dan mampu perkembangan zaman sehingga pelayanan publik ditingkatkan desa di era digital lebih baik dan meningkat

**TANTANGAN
PELAYANAN
PUBLIK DI
ERA DIGITAL**

Terdapat dua tantangan pelayanan public di desa temon yaitu tantangan infrastruktur digital yang dapat mendukung pelayanan public diantaranya ketersediaan jaringan internet yang cukup memadai, menu informasi desa yang mudah diakses. Tantangan yang berikutnya adalah SDM, yaitu kemampuan literasi warga dalam memanfaatkan media sosial, media digital untuk mengakses berbagai informasi dan pelayanan publik

**PROSES
PENINGKATAN**

Proses peningkatan kapasitas SDM yang dilakukan oleh pemerintah desa temon sudah baik walaupun banyak kendala, akan tetapi banyak usaha yang telah dilakukan untuk peningkatan kapasitas SDM perangkat desa temon sawoo ponorogo

LANGKAH KONGKRIT



Langkah kongkrit yang dilakukan pemerintah desa temon adalah mengikuti, serta menyelenggarakan berbagai pelatihan dan bimbingan teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengikuti program digital (smart village), melaksanakan publikasi kegiatan desa, mengikuti paralegal desa kabupaten malang tahun 2023, menyelenggarakan peningkatan UMKM dan membuat web desa.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan teori yang dijadikan landasan dalam penyusunan karya tulis ini dapat disimpulkan bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pelayanan publik perlu mendapatkan perhatian khusus, karena sudah menjadi sebuah tuntutan dengan perputaran perkembangan zaman yang semakin maju.

Untuk bisa meningkatkan pelayanan publik di era digital sangat dibutuhkan peningkatan SDM dan Sumber Daya Dukung lainnya, seperti alat dan jaringan internet untuk mengakses semua informasi di media sosial.

Pemerintah Desa Temon sudah melakukan Upaya-upaya peningkatan kapasitas perangkat desa walaupun belum maksimal dalam pelaksanaannya akan tetapi walaupun demikian pemerintah Desa Temon masih terus berupaya meningkatkan kapasitas dan pelayanan publik kearah yang lebih baik sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman.

Adapun beberapa upaya peningkatan kapasitas perangkat Desa Temon yang telah dilakukan adalah terus mengikuti perkembangan informasi, selalu koordinasi antar desa dan melakukan peningkatan SDM baik secara mandiri maupun berkelompok sesuai tupoksi perangkat desa.

Disamping itu pada bulan desember 2023 mengikut sertakan perangkat Desa dan BPD dalam kegiatan peningkatan kapasitas perangkat dan BPD di kota malang yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan melalui forum koordinasi antar Desa se kecamatan sawoo.

B. SARAN

Zaman semakin maju, informasi yang semakin mudah di akses sudah semestinya pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan perlu untuk segera beradaptasi dengan perubahan sistem, yaitu dari sistem tradisional menjadi sistem digital, diantaranya yaitu menggunakan google form , Link-link pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang bisa di akses oleh masyarakat.

Peningkatan kapasitas SDM secara berjenjang, berkelanjutan dan berkesinambungan menjadi sebuah keharusan agar pelayanan publik lebih meningkat, disamping pembangunan isnfrastruktur yang harus dipenuhi secara bertahap.

Perlu kiranya adanya sebuah program kusus dalam pengembangan SDM dalam hal penguasaan media sosial, peningkatan kemampuan dalam hal IT, pelatihan-pelatihan, diklat dan berbagai bimtek lainnya, agar pemeritahan Desa Temon lebih maju, lebih meningkat dari berbagai bidang terutama dalam pelayanan publik di era digital.

Daftar Pustaka

- Abd Aziz, M. A., Ab Rahman, H., Alam, M. M., & Said, J. (2015). Enhancement of the accountability of public sectors through integrity system, internal control system and leadership practices: A review study. *Journal Procedia Economics and Finance* Volume 28, 2015, from : <https://jim.usk.ac.id/sejarah/article/viewFile/24833/11640>
- Aliamsyah, M. (2009). Pemanfaatan Sistem Informasi Bagi Perancang Peraturan Perundang- Udangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4).
- Andrianto, N. (2007). *Government: Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-government*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Anugerah Yuka Asmara, A. Y. S. R. (2019). Inovasi Pelayanan Kesehatan Gancang Aron di Kabupaten Banyuwangi dalam Perspektif Matrik Inovasi Sektor Publik. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*.
- Araujo, L. M. de, Priadana, S., Paramarta, V., & Sunarsi, D. (2021). Digital leadership in business organizations. *International Journal of Educational Administration, Management, and Leadership*, 2(1).
- Astomo, P. (2014). Pembentukan Undang-Undang Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 11(3).
- Butler, C. (2012). *Henri Lefebvre: Spatial Politics, Everyday Life and The Right to The City*. London: Routledge.
- Damanik, M. P. (2016). Kerangka Kerja Pengembangan Konsultasi Publik Elektronik Di Lembaga Pemerintahan. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 5(2).
- Febriantianingrum, B. (2021). Petisi Daring: Bentuk Partisipasi Publik dalam Pemerintahan di Era Digital. Retrieved from <https://digitalbisa.id/artikel/petisi-daring-bentuk-partisipasi-publik-dalampemerintahan-di-era-digital-lxaHx>
- Gao, Z., Wang, S., & Gu, J. (2020). Public Participation in Smart-City Governance: A Qualitative Content Analysis of Public Comments in Urban China. *Sustainability (Switzerland)*, 12 (20).
- Haliim, W. (2016). *Demokrasi Deliberatif Indonesia : Konsep Partisipasi Masyarakat Dalam Membentuk Demokrasi Dan Hukum Yang Responsif*. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 42(1).

Levenda, A. M., & Keough, N., Rock, M. (2020). Rethinking public participation in the smart city. ... /Le Géographe Canadien.

Li, G., Wang, Y., Luo, J., & Li, Y. (2018). Evaluation on Construction Level of Smart City: An Empirical Study from Twenty Chinese Cities. Sustainability (Switzerland), 10 (9).

Lim, Y., Edelenbos, J., & Gianoli, A. (2019). Identifying the results of smart city development: Findings from systematic literature review. Cities.

Littlejohn, S. W. (2014). Teori Komunikasi. Salemba Humanika



Lampiran Dokumentasi

Lampiran 1

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Temon



Lampiran 2

Pelayanan Publik



Lampiran 3

Dokumentasi Pelatihan-Pelatihan



Lampiran 4

Wawancara dengan nara sumber

a. Wawancara dengan Kepala Desa Temon



b. Wawancara dengan Sekertaris Desa Temon



c. Wawancara dengan Kasi Pelayanan



SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202425590, 20 Maret 2024

Pencipta

Nama : **Sunarji, Irvan Nur Ridho, M.Si. dkk**

Alamat : Dukuh Brenggolo Desa Temon Kec. Sawoo Kab. Ponorogo Prov. Jawa Timur 63475, Sawoo, Ponorogo, Jawa Timur, 63475

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Universitas Muhammadiyah Ponorogo**

Alamat : Jalan Budi Utomo 10 Kel. Ronowijayan Kec. Siman Kab. Ponorogo Prov. Jawa Timur 63471 Gedung D Rektorat Lantai 3, Siman, Ponorogo, Jawa Timur 63471

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Poster**

Judul Ciptaan : **Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Dalam Pelayanan Publik Di Era Digital Di Desa Temon Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo 2024**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 5 Februari 2024, di Ponorogo

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000600944

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Sunarji	Dukuh Brenggolo Desa Temon Kec. Sawoo Kab. Ponorogo Prov. Jawa Timur 63475, Sawoo, Ponorogo
2	Irvan Nur Ridho, M.Si.	Dukuh Kutu 001/001 Ds. Kutu Kulon Kec. Jetis Kab. Ponorogo Prov. Jawa Timur 63473, Jetis, Ponorogo
3	Yusuf Adam Hilman, S.IP., M.Si.	Perum Asabri Blok A3 RT 1 RW 3 Desa Pijeran Kec. Siman Kab. Ponorogo Prov. Jawa Timur 63471, Siman, Ponorogo
4	Drs. Bambang Triono, M.Si.	Perum Kertosari Indah O-05 RT 2 RW 2 Kertosari Kec. Babadan Kab. Ponorogo Prov. Jawa Timur 63491, Babadan, Ponorogo

